

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Permukaan bumi yang menjadi salah satu sumber daya alam sangat penting untuk kelangsungan makhluk hidup adalah tanah, dimana makhluk hidup yang ada dunia memiliki keterkaitan dengan tanah terutama dalam hal kebutuhan pangan. Bagi manusia sendiri, tanah menjadi sebuah komoditas ekonomis yang nantinya akan dimanfaatkan untuk bertahan hidup (Adriansa, Adhim, dan Silviana, 2020). Tanah yang selama ini dijadikan komoditas utama bagi manusia seringkali menimbulkan sebuah permasalahan sosial terutama pada bidang pembangunan. Pada permasalahan pembangunan yang dilakukan oleh negara demi memenuhi kebutuhan masyarakat seringkali menimbulkan konflik antara pemerintah dengan masyarakat. Pembangunan untuk fasilitas umum sangat riskan memunculkan sebuah konflik seperti pembebasan tanah, sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat perlu memperhatikan hak-hak rakyat. Konflik pertanahan biasanya muncul diakibatkan dari adanya ketidaksesuaian serta adanya ketidakadilan seperti hilangnya ruang hidup, baik lapangan pekerjaan ataupun tempat tinggal, secara jangka panjang (Basri, 2013).

Desa Wadas yang terletak di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu daerah yang sangat subur. Tanah yang ada di Desa Wadas bagi penduduk setempat dimanfaatkan sebagai penyangga kehidupan dan dijadikan mata pencaharian mereka tak heran penduduk menyebut daerah tersebut dengan julukan Alas Wadas. Manfaat lain dari daerah

Alas Wadas yaitu sebagai fungsi resapan air serta sebagai tempat hidup dari berbagai flora dan fauna endemik setempat. Tanah Desa Wadas merupakan daerah yang sangat vital dikarenakan 95% penduduk Wadas berprofesi sebagai petani. Hal itu tidak dipungkiri bahwa sudah bertahun-tahun lamanya seluruh aktifitas masyarakat menggantungkan kehidupannya dengan potensi sumber daya yang ada di tanah Wadas. Tanah Wadas dianggap oleh masyarakat setempat sebagai tanah kehidupan yang mampu menghidupi mereka hingga beberapa keturunan mereka, sehingga masyarakat Wadas memiliki hubungan dengan alam yang sangat kuat dan dalam.

Potensi lain dari tanah yang ada di Desa Wadas selain sebagai penghidupan masyarakat setempat ternyata juga mengandung potensi berupa batuan andesit yang cukup besar yang biasanya dapat dijadikan sebagai bahan material untuk suatu pembangunan. Batuan andesit adalah salah satu batuan yang memiliki struktur yang kuat dan kokoh jika dijadikan sebagai bahan material. Sehingga, dalam proyek pembangunan Bendungan Bener, tepatnya di Desa Guntur, direncanakan akan mengambil bahan material batuan andesit yang berada di Desa Wadas. Proyek Bendungan Bener termasuk dari proyek strategis nasional yang sudah disahkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 56 Tahun 2018. Proyek Bendungan Bener akan dibangun dengan luasan bendungan meliputi 11 Desa, 3 Kecamatan serta 2 Kabupaten telah memiliki nilai investasi yang di siapkan untuk rencana proyek sekitar Rp. 4 Triliun yang berasal dari APBN. Namun, dalam pelaksanaan rencana proyek pembangunan Bendungan Bener tersebut mengalami banyak penolakan dari warga asli Wadas yang menggantungkan kehidupannya dengan alam Wadas serta dari berbagai aktifitas

lingkungan karena akan merusak potensi kesuburan tanah yang ada serta mengancam kehidupan masa depan anak cucu mereka.

Masyarakat Desa Wadas dalam melakukan penolakan terhadap proyek penambangan batuan andesit untuk pembangunan Bendungan Bener membuat paguyuban yang dinamakan Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (GEMPA DEWA). Secara konsisten masyarakat Wadas melakukan penolakan berawal dari dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/41 Tahun 2018 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bendungan Bener di kabupaten Purworejo dan Wonosobo Jawa Tengah pada 5 Juni 2020 semakin memperparah gelombang protes warga.

Kelompok gerakan penolakan ini memiliki arah gerak untuk melakukan penolakan rencana terhadap wilayah quarry sesuai dengan ketentuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Secara pemaknaan, quarry merupakan daerah yang nantinya akan diambil tanahnya guna kebutuhan untuk pembangunan bendungan, dalam kasus Wadas yaitu Bendungan Bener. Namun, AMDAL yang telah disusun sebagai salah satu syarat dalam rencana pembangunan sama sekali tidak melibatkan masyarakat dalam proses penyusunannya. Hal itu bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan yang mengharuskan adanya keterlibatan masyarakat terdampak dalam penyusunannya dan masyarakat Desa Wadas merupakan salah satu yang terdampak dari adanya pembangunan tersebut.

Penolakan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wadas atau GEMPA DEWA sangatlah memiliki alasan serta dilakukan dengan melalui berbagai cara baik litigasi ataupun non-litigasi. Di lahan yang memiliki potensi sumberdaya alam subur seperti durian, aren, karet, umbi-umbian, rempah-rempah, kayu keras serta berbagai tanaman lain yang telah menjadi sumber penghidupan utama masyarakat setempat. Rencana penambangan quarry andesit di Desa Wadas akan dilakukan dengan melalui pengerukan, pengeboran serta peledakan dengan 5300 ton dinamit pada kedalaman 40 meter dengan kurun waktu 30 bulan di atas lahan seluas 145 hektar dengan target 15,53 juta m<sup>3</sup>. Penambangan menggunakan cara ini berpotensi merusak bentang alam serta lingkungan masyarakat setempat. Berdasarkan Pasal 42 huruf c dan Pasal 45 huruf e Perda RT RW Purworejo, Desa Wadas adalah salah satu desa yang memiliki kerawanan kekeringan dan longsor tinggi. Selain itu, Desa Wadas penghasil berbagai komoditas dalam hal perekonomian seperti, durian, kopi robusta, kelapa, kakao, cengkeh, kemukus, karet, vanili, kayu keras, umbi-umbian dan sebagainya. Hasil Komoditas Desa Wadas bukanlah sedikit dan per tahunnya bisa menghasilkan sekitar Rp8.5 miliar rupiah.

Hal tersebut menimbulkan kesadaran kolektif untuk mempertahankan ruang hidup mereka. Dimana mereka akan kehilangan mata pencaharian tempat tinggal mereka jika penambangan dilakukan. Dengan dasar tersebut akhirnya memunculkan sebuah perlawanan dari masyarakat baik dari laki-laki maupun perempuan. Mereka tidak memandang gender dalam setiap gerakan penolakannya dan mereka saling mengisi dalam gerakan penolakannya. Keterlibatan perempuan dalam gerakan kolektif tersebut telah memantik para peneliti untuk mengkajinya

dengan mengkaitkan konsep yang bernama ekofeminisme, sehingga dalam keberjalannya istilah ekofeminisme sering digunakan bagi perempuan yang berjuang untuk menjaga alam atau ekologi. Pada konflik di Wadas keterlibatan perempuan sebagai aktor gerakan juga menjadi salah satu opsi strategi dalam menunjukkan eksistensi kesetaraan gender dalam pergerakan. Dasar alasan tersebut menjadi salah satu alasan masyarakat Wadas membuat paguyuban yang diberi nama GEMPA DEWA dan paguyuban Wadon Wadas dengan keanggotaannya berisi para perempuan Desa Wadas.

Francoise D' Eaubonne adalah tokoh yang pertama kali menggunakan kata dengan sebutan kata ekofeminisme, namun istilah tersebut baru ramai ketika naiknya isu pertentangan terkait perusakan lingkungan yang menyebabkan permasalahan ekologis bahkan bencana ekologis yang terus-menerus terjadi. Dalam pandangan feminisme, kerusakan ekologi menimbulkan dampak yang cukup besar bagi perempuan serta anak-anak. Hal yang dipersoalkan mencuat ke permukaan merupakan dampak negatif dari politik global yang terjadi pada perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya krisis makanan dan air bersih bisa dikatakan sebagai permasalahan yang sedang dihadapi oleh para perempuan dan anak-anak di berbagai dunia sebab akan memiliki dampak yang cukup besar bagi angka kematian dan angka kematian ibu dan anak (Fitri, Akbar, 2017). Hal tersebut jelas akan dirasakan oleh para perempuan Wadas yang sudah dari lama memiliki kesadaran akan pentingnya tanah sebagai kebutuhan pangan, sehingga dengan adanya penambangan akan menyebabkan kerusakan bentang alam serta berbagai aktivitas kehidupan.

Pada beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan studi kasus yang sama seperti Puspitasari (2017) serta hasil penelitian dari Fitri dan Akbar (2017) terkait pertambangan yang ada di kawasan Kendeng menyatakan bahwa pengaruh terbesar dari adanya pertambangan adalah berkurangnya ketersediaan air akibat hilangnya sumber mata air akibat adanya pertambangan, padahal kebutuhan air dari masyarakat terus bertambah. Kebutuhan air menjadi salah satu alasan yang kuat bagi para perempuan kenapa mereka menjaga ekosistem ekologi dikarenakan konsep air dan perempuan yang tidak dapat dipisahkan dalam hal rumah tangga. Sehingga pembangunan Bendungan Bener yang direncanakan dapat memenuhi kebutuhan air sebesar 1500 liter/detik bagi beberapa daerah yaitu Kabupaten Purworejo (500 liter/detik), Kabupaten Kebumen (300 liter/detik), serta Kulon Progo (700 liter/detik) guna memenuhi kebutuhan air terkhusus bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA). Warga Wadas secara tegas bahwa mereka tidak menolak dengan adanya pembangunan bendungan tersebut, sebab mereka mengetahui bahwa pembangunan tersebut merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). Namun, hal yang dimasalahkan oleh masyarakat Wadas adalah penambangan yang akan mengancam sumber mata air mereka. Jika dilihat kembali bahwa tujuan adanya pembangunan bendungan tersebut yang ingin memenuhi kebutuhan air malah tidak berdampak bagi warga lokal terkait ketersediaan air.

Gerakan yang telah dibangun oleh masyarakat demi menolak adanya rencana penambangan quarry batuan andesit dimulai dari tahun 2018. Pada saat itu tanggal 17 Maret 2018 dalam forum sosialisasi yang dilakukan oleh BBWS-SO, warga wadas secara serentak dan sepakat melakukan aksi walkout di agenda

tersebut. Diikuti pada bulan berikutnya tepatnya 26 April 2018 pada agenda konsultasi publik, masyarakat Wadas melakukan aksi penolakan dengan membentangkan spanduk yang pada intinya dalam konsultasi public tersebut telah melenceng dari musyawarah mufakat. Warga Wadas dicurangi dengan cara diminta untuk menandatangani surat pencocokan namun akhirnya diubah menjadi surat kesepakatan dalam konsultasi publik. Kecurangan dalam administrasi berupa tanda tangan warga tersebut dilakukan oleh pemrakarsa pengada tanah rencana penambangan quarry batuan andesit di Desa Wadas.

Pada 7 Juli 2018 Surat Keputusan Nomor 590/41 Tahun 2018 dikeluarkan akhirnya disusul dikeluarkannya oleh Gubernur Jawa Tengah yang mengakibatkan penolakan dari masyarakat terus berlanjut tanpa mengindahkan aspirasi dari masyarakat setempat dan tanpa ada sebuah pertemuan dengan masyarakat untuk melakukan pembahasan permasalahan atas keluarnya Surat Keputusan tersebut. Setelah itu pada 5 Juli 2020, Gubernur Jawa Tengah mengeluarkan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 539/29 Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Wonosobo Provinsi Jawa Tengah. Pada Surat Keputusan tersebut justru Desa Wadas masuk kedalam obyek pembangunan bendungan Bener. Atas permasalahan tersebutlah yang menjadi dasar alasan kenapa pada akhirnya GEMPA DEWA mengajukan surat keberatan terhadap rencana pelaksanaan inventarisasi serta identifikasi objek maupun subjek dalam pengadaan tanah di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo.

Represifitas aparat terhadap para perempuan Wadas tak luput juga pernah terjadi dalam sejarah gerakannya. Pada tanggal 28 April 2021, pada saat itu ibu-

ibu Wadas berkumpul di posko penjagaan untuk rencana menghadang orang-orang yang akan mengukur dan mematok tanah di lahan yang warga yang ada di Desa Wadas oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBSO). Pengukuran dan pematokan tersebut sebagai salah satu rencana penambangan batuan andesit yang nantinya akan dijadikan bahan material PSN, Bendungan Bener. Kedatangan BBWSO yang di dampingi para aparat kepolisian (Polres Purworejo) langsung dihadang oleh masyarakat Wadas termasuk para Wadon Wadas. Tak selang beberapa jam, bentrok antara warga Wadas dengan aparat kepolisian terjadi. Beberapa persenjataan yang digunakan oleh aparat kepolisian atas bentrok yang terjadi adalah gas air mata. Hal itu menimbulkan beberapa masyarakat mengalami luka dan terkena intimidasi. Sehingga, dalam represifitas tersebut menghasilkan 12 masyarakat sipil, termasuk dua pendamping hukum, diangkut menggunakan mobil barikade.

Menurut pernyataan dari Vandana Shiva dalam (Meylan, 2014) yang menyatakan keterlibatan perempuan dalam berbagai penolakan ataupun gerakan sosial dalam fokus ekologi dikarenakan mereka menjadi korban dari adanya penurunan kualitas lingkungan yang menjadi komoditas mereka dalam memenuhi kehidupan. Dalam sejarah umat manusia, perempuan memiliki peran dalam menjaga hubungan dengan alam melalui konservasi, penggunaan, dan pengelolaan sumber daya alam. Sehingga dalam konsep ekofeminisme, perempuan memiliki arah sebagai motor penggerak serta sekaligus korban yang berhadapan langsung dengan penguasa dalam menyelamatkan lingkungan. Bagi Indonesia dengan tingkat kerusakan lingkungan yang sangat masif serta posisi perempuan dalam



sosial yang masih lemah akan menjadi tantangan dalam keberjalanan implementasi konsep ekofeminisme.

Paguyuban perempuan-perempuan yang ada di Desa Wadas atau disebut Wadon Wadas menjadi salah satu gerakan yang menerapkan konsep dari ekofeminisme. Rasa kesadaran dari para perempuan di Desa Wadas tersebut muncul secara organik mengenai bagaimana pentingnya alam bagi kehidupan terkhusus pada pihak perempuan. Mereka mampu memobilisasi para perempuan agar peduli dengan ekosistem yang ada di Wadas. Dampak dari adanya rencana penambangan serta sulitnya gerakan melawan kekuasaan menjadikan berbagai gerakan yang dibentuk oleh para perempuan Wadas semakin masif. Pada aksi yang dilaksanakan pada 9 Agustus 2021 dalam agenda persidangan mendengarkan keterangan dari saksi/ahli penggugat, para perempuan Wadas melakukan aksi menganyam besek dan besek tersebut dibagikan kepada masyarakat sekitar pengadilan tata usaha negeri (PTUN). Hal itu sebagai salah satu bentuk perlawanan secara simbolik dimana perempuan memiliki kemampuan caring dan nurturing. Hal itu berkaitan dengan tradisi yang ada di Wadas memanfaatkan bambu menjadi anyaman yang akhirnya menjadi kebudayaan serta identitas diri masyarakat setempat.

Pandangan baru yang dibangun oleh ekofeminisme menjelaskan paradigma bahwa etika lingkungan bukan sebatas hubungan manusia dengan alam namun juga hubungan keseimbangan antara keduanya. Sehingga atas hal tersebut berdampak pada adanya kelestarian alam. Bukan hanya untuk generasi sekarang, namun juga untuk generasi yang akan datang (Shiva dan Maria, 2005). Perjuangan para perempuan Wadas memiliki peran yang sangat penting dalam

memantik kesadaran pemikiran masyarakat untuk ikut serta dalam gerakan perlawanan yang pro akan lingkungan dan alam. Jika dilihat dari studi kasus konflik Wadas, perempuan Wadas berusaha mempertahankan ruang hidup yang akan hilang dengan melalui eksploitasi pertambangan. Kepercayaan terhadap nilai spiritual mengenai kelestarian alam merupakan kehendak dari sang pencipta alam semesta yang merupakan salah satu unsur yang sangat di tanamkan dan dipegang sampai saat ini. Perjuangan Wadon Wadas dalam pandangan ekofeminisme memiliki karakteristik yang sangat menarik dan dapat menjadi landasan berpikir untuk berjuang dalam menolak adanya pertambangan batuan andesit.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka yang akan menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola gerakan perlawanan Gempa Dewa dalam menolak rencana pertambangan batuan andesit di Desa Wadas?
2. Bagaimana peran Wadon Wadas dalam gerakan perlawanan yang dilakukan oleh Gempa Dewa?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis kronologi dari penyebab adanya konflik rencana pertambangan batuan andesit di Desa Wadas.
2. Memetakan peran perempuan dalam gerakan perlawanan rencana pertambangan batuan andesit di desa wadas dalam pandangan ekofeminisme.
3. Menganalisis hambatan serta respon yang dilakukan oleh perempuan Wadon Wadas pada penolakan rencana pertambangan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki dua manfaat yakni secara teoritis dan juga secara praktis, yaitu:

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Secara akademis dengan dilakukannya penelitian ini dapat memperluas wawasan sebagai pembelajaran kedepannya mengenai peran perempuan serta pola gerakan yang dibangun oleh perempuan dalam gerakan penolakan rencana pertambangan batuan andesit di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo melalui sudut pandang ekofeminisme.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Secara praktis dapat dijadikan bahan evaluasi maupun pertimbangan bagi pemerintah maupun masyarakat dalam perumusan kebijakan supaya dalam pembuatan kebijakan tidak terlalu merugikan masyarakat serta tetap mempertimbangkan keseimbangan alam.

#### **1.5 Penelitian Terdahulu**

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, peneliti mencantumkan penelitian yang pernah dilakukan sebagai bahan referensi penelitian sejenis, diantaranya:

1. Skripsi “*GERAKAN PEREMPUAN MELAWAN KORPORASI TAMBANG (Studi Perspektif Gender di Pegunungan Kendeng Utara, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah)*” oleh Dia Puspitasari Progam Studi S1 Sosiologi Universitas Airlangga (2017). Penelitian ini berfokus pada pemahaman perempuan Rembang atas alam yang di eksploitasi oleh perusahaan PT. Semen Indonesia serta strategi gerakan perempuan Rembang dalam melawan tambang. Temuan dan penjelasan dari penelitian ini adalah, dalam proses gerakan serta gerakan yang dibangun, para perempuan kendeng memiliki satu pemikiran bahwa perempuan dan bumi adalah satu kesatuan yang sama-sama perlu dijaga. Hal itu dipengaruhi oleh faktor historis mengenai nilai-nilai ajaran sedulur sikep hingga di internalisasikan kedalam individu para perempuan Rembang. Perempuan Kendeng memiliki dasar filosofis dalam pandangan hidup yang menyatakan jika perempuan akan menghasilkan keturunan dengan ibu rahimnya, alam juga akan menghasilkan penghidupan bagi manusia dengan

Rahim yang dimilikinya. Hal itu ditanamkan sebagai bentuk keberlangsungan hidup anak serta cucu mereka supaya dapat melanjutkan keturunan dan tidak sulit dalam mendapatkan sumber penghidupan.

Temuan lain dalam penelitian ini, strategi gerakan ekofeminisme yang berbasis pada kesadaran ekologi serta gender. Dalam gerakan yang digunakan pada penolakan pabrik semen, strategi yang digunakan tidak menggunakan aksi yang pernah dilakukan sebelumnya pada gerakan-gerakan perlawanan seperti Aksi mengecor kaki. Dengan adanya pembangunan pabrik semen, sumber pengairan akan terancam dan akan memunculkan berbagai permasalahan baru yang menyangkut penghidupan bagi masa mendatang. Kesadaran gender yang ada memunculkan pemahaman mengenai tidak adanya perdebatan laki-laki dan perempuan. Sebab mereka sudah memahami bahwa gerakan yang dibangun harus berjalan beriringan serta saling mengisi satu sama lain serta sudah memiliki perannya masing-masing.

2. Jurnal “Gerakan Sosial Perempuan Ekofeminisme di Pegunungan Kendeng Provinsi Jawa Tengah Melawan Pembangunan Tambang Semen” Oleh Annisa Innal Fitri dan Idil Akbar Departemen Ilmi Pemerintahan Universitas Padjajaran (2017). Penelitian ini berfokus pada gerakan dalam perlawanan yang dilakukan oleh perempuan yang berada di sekitar Pegunungan Kendeng. Pada kasus yang ada, aktor yang ada dilakukan oleh para kelompok perempuan yang setiap harinya memiliki aktifitas bertani serta memiliki hubungan erat dengan alam. Gerakan tersebut dibangun sebagai bentuk perlawanan atas diskriminasi serta ketidaksetaraan antara

manusia dengan alam. Sehingga, perwujudan yang dilakukan adalah perempuan Kendeng merasa memiliki hak sipil dalam mengemukakan pendapat termasuk dalam perumusan kebijakan. Kesadaran dalam gerakan tersebut muncul secara organik atau tumbuh secara sadar pada setiap individu perempuan Kendeng. Hal itu dikarenakan dengan adanya pembangunan pabrik semen dapat mengancam keberlangsungan hidup mereka. Strategi yang dibangun dalam gerakan perempuan ini adalah upaya menonjolkan perempuan sebagai aktor gerakan perlawanan.

## **1.6 Kerangka Teori**

### **1.6.1 Gerakan Sosial Baru**

Perkembangan sejarah mengenai mengenai teori gerakan sosial sebenarnya dimulai sudah jauh sekali yaitu pada runtutan revolusi yang terjadi pada Eropa Barat akhir abad 17-19. Mulai dari itu, rangkaian revolusi dianggap masih mengadopsi konsep dari *Old Social Movement* (Gerakan Sosial Lama). Memasuki era 1960-an, perkembangan mengenai teori gerakan sosial sudah mengalami masa baru dimana para intelektual atau akademisi memberikan kritikan terhadap teori *Old Social Movement* untuk disesuaikan pada kondisi yang ada dan lebih modern. Pada transformasi *Old Social Movement* tersebut yaitu *New Social Movement* atau Gerakan Sosial Baru yang digunakan sebagai analisis di setiap penelitian gerakan sosial, mulai 1970-an sampai sekarang (Situmorang, 2019 :24).

Pada sejarah Gerakan Sosial Baru dimulai pada masyarakat Eropa serta Amerika yang sudah memunculkan bentuk gerakan yang ber-skala besar mengenai isu-isu yang berkaitan pada nilai-nilai kultural, humanis serta non-materialistik. Perbedaan mengenai *Old Social Movement*, *New Social Movement*

sudah tidak lagi terjebak pada hal yang berkaitan dengan ideologis. Dimana Gerakan Sosial Lama, masih berputar dengan mempertanyakan anti kapitalisme, perjuangan kelas serta revolusi kelas. Sehingga, pada gerakan sosial baru tidak lagi memiliki ketertarikan terhadap ide revolusi ataupun gerakan yang tujuannya untuk menggulingkan suatu sistem pemerintahan. Namun, Singh (Sukmana, 2019 :10) menyampaikan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam Gerakan Sosial Baru dan Gerakan Sosial Lama, Gerakan Sosial Baru masih memiliki kesamaan dengan Gerakan Sosial Lama yaitu mengenai model gerakan. Keduanya masih terdapat lingkup memperjuangkan isu-isu peningkatan buruh, menentang eksploitasi kelas serta memperjuangkan keadilan ekonomi.

Pada dasarnya, gerakan sosial baru memiliki sifat yang plural. Dimana gerakan sosial baru lebih bergerak pada hal anti-rasialisme, anti-nukliarisme, perlucutan senjata, feminisme, lingkungan, regionalisme dan etnisitas, kebebasan sipil, dan sebagainya hingga mengenai isu kebebasan personal dan perdamaian. Perkembangan masyarakat dari masyarakat modernitas menuju masyarakat pasca modernitas dapat merefleksikan mengenai terjadinya perubahan pandangan dari gerakan sosial dari bentuk lama (klasik dan neo-klasik) ke dalam bentuk Gerakan Sosial Baru (New Social Movements). Dengan hal itu, adanya perubahan bentuk masyarakat memiliki hubungan terkait terjadinya perubahan bentuk mengenai gerakan sosial (Singh, 2001: 97).

Sehingga, paradigma yang ada pada Gerakan Sosial Baru memiliki perbedaan dengan paradigma pada Gerakan Sosial Lama (Old Social Movement) secara fundamental atau memiliki karakteristik khusus pada Gerakan Sosial Baru. Pichardo (1997: 414) menjelaskan bahwa terdapat empat aspek karakteristik

khusus yang dapat dilihat dari Gerakan Sosial Baru (New Social Movement), yaitu:

### 1. Tujuan dan Ideologi (*Ideology and Goals*)

Hal paling utama dari Gerakan Sosial Baru (GSB) adalah mengenai perbedaan pandangan ideologi. Paradigma Gerakan Sosial Baru (GSB) menjelaskan, gerakan sosial kontemporer menunjukkan keterputusan dari gerakan di masa industrial. Gerakan Sosial Baru memfokuskan pada perhatian terhadap kualitas serta gaya hidup, bukan lagi terfokus pada redistribusi bidang ekonomi seperti yang dilakukan oleh gerakan kelas pekerja. Dengan hal itu, New Social Movement mempertanyakan mengenai kekayaan yang memiliki orientasi materialistik dari masyarakat industrial. Selain itu juga, New Social Movement juga mempertanyakan terkait struktur dari representasi sebuah demokrasi yang menutup hal keterlibatan warganegara dalam pemerintahan yang tidak mendukung akan demokrasi langsung, kelompok-kelompok swadaya, gaya kooperatif dari organisasi-organisasi sosial. Nilai-nilai yang ada di Gerakan Sosial Baru (GSB) terpusat dalam otonomi serta identitas (*outonomy and identity*). Klaim identitas merupakan ciri paling terlihat dari Gerakan Sosial Baru (GSB), biarpun semua gerakan sebelumnya juga bisa dirangkakan sebagai pengakuan yang mengekspresikan dari identitas. Selain itu, sifat lainnya ialah ideologi pada Gerakan Sosial Baru (GSB) dimana sebagai karakter refleksi diri (*self-reflective character*). Hal ini menunjukkan terkait partisipan selalu mempertanyakan makna dari apa yang sedang dilakukan sehingga mengarahkan kepada pilihan sadar tentang struktur dan aksi.

### 2. Taktik (*Tactics*)



Gerakan Sosial Baru lebih memilih tetap berada di luar saluran politik normal dengan menggunakan taktik mengganggu (*disruptive tactics*) serta memobilisasi opini publik (*mobilizing public opinion*) yang bertujuan mendapatkan pengaruh politik. Selain itu juga seringkali cenderung menggunakan demonstrasi yang sangat dramatis serta direncanakan melalui representasi kostum dan simbol (*symbolic and costumes representations*). Namun demikian, bukan berarti Gerakan Sosial Baru tidak melibatkan diri dalam politik atau bahkan menghindar untuk melembagakan diri, Menurut Eder (1985) dalam (Sukmana, 2016 :137) Gerakan Sosial Baru adalah bentuk wujud protes dari kelas menengah (*middle-class protest*) berkaitan dengan usaha memberantas tekanan dari kelompok politik untuk gerakan sosial. Beberapa Gerakan Sosial Baru terintegrasi ke dalam sistem partai serta memperoleh akses reguler pada hal regulasi, implementasi, dan badan pengambilan keputusan, sementara yang lain sudah membentuk partai politik untuk ikut serta pada kontes pemilihan keterwakilan. Meskipun tidak adanya korespondensi yang muncul secara langsung antara Gerakan Sosial Baru dengan mereka yang membentuk partai. Sehingga pada akhirnya, Gerakan Sosial Baru (*New Social Movement*) mengakui bahwa paradigma bahwa tidak adanya taktik yang khas pada Gerakan Sosial Baru serta sebatas opini publik dan politik antiinstitusi sebagai tambahan baru serta lebih menonjol pada sandiwara dari gerakan sosial.

### 3. Struktur (*Structure*)

Sifat anti institusi Gerakan Sosial Baru ikut meluas mengenai bagaimana cara mereka mengatur. Gerakan Sosial Baru berusaha mereplikasi ke dalam struktur mereka sendiri terhadap konsep perwakilan pemerintahan yang

diinginkan. Mereka mengorganisir diri ke dalam gaya yang fleksibel atau tidak kaku guna menghindari budaya-budaya oligarki. Selain itu, mereka memiliki kecenderungan dalam melakukan pergantian kepemimpinan, suara mayoritas dalam semua isu, serta mereka memiliki organisasi yang sifatnya sementara yang tidak tetap atau permanen. Sikap lain daripada itu ialah sikap anti birokrasi, dimana mereka meawan yang sekiranya mereka anggap dehumanisasi yang ada di birokrasi modern. Sehingga, seruan mereka ialah bagaimana memunculkan struktur yang lebih responsif kepada individu, terbuka, desentralis, serta non hierarkis. Meskipun, pada idealnya Gerakan Sosial Baru mengalami perkembangan yang kearah modern dimana kelompok organisasi memiliki sifat yang hierarki sebagai bentuk kinerja yang terpusat.

#### 4. Partisipasi dari Gerakan Kontemporer (*Participants of cotemporary movement*)

Basis pertama dukungan yang berasal dari kelas menengah baru (*new middle class*), yaitu sebuah strata sosial pekerja baru yang hadir pada sektor ekonomi non produktif. Meningkatnya kelas menengah baru pada masyarakat pascaindustri (*postindustrial society*) membentuk basis berupa dukungan partisipan Gerakan Sosial Baru. Dukungan kelas menengah kepada Gerakan Sosial Baru muncul berawal dari mereka yang tendensinya bekerja di wilayah yang sangat bergantung pada pengeluaran Negara layaknya seniman akademisi, serta agen-agen pelayan kemanusiaan, dimana mereka harus berpendidikan tinggi. Pada pandangan lain, partisipan pada gerakan sosial baru ialah bahwa mereka tidak diartikan oleh batas kelas namun ditandai oleh isu-isu sosial yang di perhatikan secara umum. Pada basis partisipan Gerakan Sosial Baru bukan terkait bukan

etnis, agama, ataupun komunitas berbasis kelas (class-based community) melainkan hal Ideologi. Mengenai siapa partisipan pada Gerakan Sosial Baru, Offe (1985) dalam (Sukmana, 2016 :139) menggambarkan terdapat tiga sektor mengenai partisipan dalam Gerakan Sosial Baru, yaitu: kelas menengah baru (new middle class), elemen kelas menengah lama (seperti petani, pemilik toko, dan produser artis), serta populasi yang terdiri dari orang-orang yang tidak banyak terlibat dalam pasar kerja (mahasiswa, ibu rumah tangga, dan pensiunan).

McAdam, McCarthy, dan Zald dalam bukunya “*Comparative Perspective on Social Movements: Political Opportunity, Mobilizing Structure, and Cultural Framings*”, memberikan penjelasan bahwa terdapat tiga faktor yang utama dalam mengkaji serta menganalisis mengenai perkembangan dan kemunculan dari gerakan sosial pada perspektif komprehensif teori gerakan sosial (McAdam, McCarthy, dan Zald, 2004: 2). Ketiga faktor tersebut ialah, (1) Peluang-peluang politik (Political opportunities); (2) Struktur mobilisasi (Mobilizing structures); dan (3) Pembingkai kultural (Cultural framing). Dalam penjelasannya ketiga faktor tersebut memiliki hubungan keterkaitan yang dijadikan sebagai kerangka berpikir konseptual.

#### **1.6.1.1 Peluang Politik atau Kesempatan Politik**

Teori proses politik tentang gerakan sosial pertamakali dirumuskan oleh Douglas McAdam pada tahun 1982 dalam sebuah buku yang berjudul *Political Proses and the Development of Black Insurgency 1930-1970* (Locher, 2002: 264). Isilah *the Political Proses Theory* (Teori Proses Politik) seringkali disebut juga

dengan istilah *Political Opportunity Approach* (Pendekatan Kesempatan Politik) atau *Political Opportunity Structure* (Struktur Kesempatan Politik).

Menurut Sukmana (2016: 179), Teori Proses Politik memfokuskan kepada faktor-faktor yang dapat memungkinkan gerakan sosial berhasil, faktor politik dan ekonomi dianggap jauh lebih penting dibandingkan faktor-faktor personal. Teori Proses Politik lebih banyak memfokuskan kepada faktor-faktor yang memungkinkan warga negara biasa membentuk suatu gerakan sosial mereka sendiri yang bertentangan dengan masyarakat dominan.

Fokus dari Teori Proses Politik adalah lebih banyak kepada koneksi politik daripada kepada sumberdaya material. Sebuah gerakan sosial dipandang sebagai fenomena politik, bukan fenomena psikologis seseorang. Gerakan sosial dipandang sebagai upaya rasional dari kelompok untuk memperoleh pengaruh yang cukup demi memajukan kepentingan-kepentingan politik mereka. Semua gerakan sosial merupakan perjuangan untuk melawan penindasan sosial dan politik (Sukmana, 2016: 179).

McAdam (Locher, 2002: 265), berpendapat bahwa ada tiga faktor determinan yang dapat mendorong keberhasilan suatu gerakan sosial, yakni: (1) Kekuatan organisasi; (2) Pembebasan kognitif; dan (3) Peluang-peluang politik. Namun dari ketiga faktor tersebut, peluang-peluang politik merupakan aspek sangat penting dibandingkan dengan dua faktor yang lainnya. Organisasi-oraganisasi gerakan, harus memperoleh dan menggunakan kekuasaan politik untuk mencapai hasil yang signifikan. Peluang-peluang politik, yakni keselarasan antara kelompok dengan lingkungan politik yang lebih besar. Semakin besar suatu

kelompok dapat bersatu dalam arena politik, maka semakin besar kemungkinannya untuk dapat melakukan perubahan dalam suatu sistem politik.

Gerakan sosial bukan suatu ruang kosong, karena gerakan sosial merupakan produk dari lingkungan sosial dan politik sekitarnya. Adanya perubahan dalam sistem, akan memungkinkan untuk munculnya sebuah gerakan sosial. Sistem sosial yang dimaksud disini, adalah dimensi-dimensi kesempatan atau peluang politik untuk menentukan gerakan sosial dapat bertahan dan beradaptasi dengan perubahan sosial dan politik. McAdam kemudian berhasil merumuskan lima dimensi peluang atau kesempatan politik dari penyederhanaan dan penambahan hasil pemikiran para ilmuwan gerakan sosial, yakni: (1) Keterbukaan atau tertutupan relatif sistem politik; (2) Stabilitas atau instabilitas aliansi-aliansi elite yang secara tipik mendasari suatu sistem politik; (3) Adanya atau tidaknya aliansi-aliansi elite; (4) Kapasitas dan kemungkinan negara untuk melakukan tekanan-tekanan atau represi; dan (5) Proses ekonomi dan politik global dalam mempengaruhi kebijakan tingkat domestik (Sukmana, 2016: 185).

Dari keempat dimensi tersebut dapat dipahami bahwa dimensi keterbukaan sistem politik akan menjadi peluang bagi terjadinya gerakan sosial, sementara tertutupan sistem politik akan menjadi pemicu bagi terjadinya gerakan sosial. Dimensi stabilisasi aliansi-aliansi elite juga dapat menjadi peluang bagi terjadinya gerakan sosial, sementara itu instabilitas aliansi-aliansi elite akan menjadi penghambat bagi terjadinya gerakan sosial. Dimensi adanya aliansi dengan elite juga dapat menjadi peluang bagi terjadinya gerakan sosial, sementara itu tidak adanya aliansi dengan elite akan menjadi penghambat bagi terjadinya gerakan sosial. Dimensi kapasitas negara dalam melakukan tekanan juga

mempengaruhi terjadinya gerakan sosial. Semakin besar kapasitas negara dalam melakukan tekanan, semakin besar juga gerakan sosial dilakukan oleh masyarakat. Dimensi proses ekonomi dan politik global telah mempengaruhi terjadinya pengambilalihan otoritas negara oleh kekuatan korporasi-korporasi transnasional, banyak pemerintah dan rakyat mereka di berbagai belahan dunia kehilangan kekuasaan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan nasional mereka. Sehingga fenomena tersebut dapat memicu gerakan sosial, namun secara tidak langsung gerakan sosial harus melawan sistem yang lebih besar (Sukmana, 2016: 185-186).

#### **1.6.1.2 Struktur dan Mobilisasi Sumberdaya**

McCarthy (McAdam, dkk., 2004: 141-142) menjelaskan konsep struktur mobilisasi sebagai cara-cara yang disepakati untuk terlibat dalam tindakan kolektif yang meliputi rencana taktik-taktik tertentu, bentuk organisasi gerakan sosial khusus, dan rancangan gerakan sosial, atau pengertian lainnya struktur mobilisasi adalah struktur-struktur yang berperan sebagai wahana mobilisasi suatu gerakan. Terdapat empat dimensi struktur mobilisasi baik bersifat formal maupun informal, dimana melalui wahana ini orang bergerak dan melibatkan diri dalam suatu tindakan kolektif. Teori Mobilisasi Sumberdaya (*the Mobilization Theory*), pertama kali diperkenalkan oleh Anthony Oberschall (Locher, 2002: 258), dengan memfokuskan perhatiannya kepada proses-proses sosial yang memungkinkan muncul dan berhasilnya suatu gerakan, proses tersebut mengacu kepada proses pembentukan kerumunan, asosiasi, dan organisasi untuk mencapai tujuan kolektif. Teori Mobilisasi Sumberdaya lebih banyak memberikan perhatian terhadap

faktor-faktor ekonomi dan politik. Faktor organisasi dan kepemimpinan merupakan faktor yang dapat mendorong atau menghambat suatu gerakan sosial.

Menurut Sukmana (2016: 158), setiap organisasi gerakan sosial harus mampu mengelola sumber-sumber yang tersedia dengan baik. Sumber-sumber yang dimaksud meliputi sumber-sumber material, seperti pekerjaan, penghasilan dan tabungan, serta sumber-sumber non-material seperti wewenang komitmen moral, kepercayaan, persahabatan, kemampuan dan lain sebagainya. Kemudian, menurut Oberschall (Locher, 2002: 206), keberhasilan dan kegagalan sebuah gerakan tergantung atas seberapa banyak orang-orang yang terhubung ke dalam organisasi, bagaimana pengorbanan mereka, apa pengorbanan mereka, dan bagaimana mereka bertahan terhadap pihak lawan.

Dalam mengembangkan pendekatan mobilisasi sumberdaya, McCarthy dan Zald (Sukmana, 198:2016) menekankan atas perspektif sentral, yakni: *Pertama*, studi agregasi (pengumpulan) sumberdaya (seperti uang dan tenaga kerja) sangat penting untuk memahami aktivitas gerakan sosial; *Kedua*, dalam upaya agregasi (pengumpulan) sumberdaya maka diperlukan minimal beberapa bentuk minimal organisasi; *Ketiga*, dalam mengkalkulasi (menghitung) tentang keberhasilan dan kegagalan sebuah gerakan ada pengakuan eksplisit akan pentingnya keterlibatan individu dan organisasi dari luar kolektivitas di mana suatu gerakan sosial terjadi; *Keempat*, model penawaran dan permintaan terkadang perlu diterapkan untuk mengkaji arus sumberdaya yang bergerak kearah menjauh dari geraka sosial; dan *Kelima*, ada kepekaan terhadap pentingnya biaya dan manfaat dalam menjelaskan individu dan keterlibatan organisasi dalam aktivitas gerakan sosial.

McCarthy, Zald dan beberapa penulis lain (Sukmana, 200: 2016), membuat daftar tentang berbagai bentuk dari sumberdaya seperti uang, fasilitas dan tenaga kerja, dan legitimasi. Perspektif mobilisasi sumberdaya juga menempatkan beberapa sumberdaya dalam masyarakat, seperti semua level pemerintahan, yayasan-yayasan, institusi keagamaan, kelompok-kelompok yang mendukung tujuan gerakan. Maka, pernyataan ini mempertegas bahwa sumberdaya bukan hanya berupa barang atau uang yang berwujud fisik, tetapi juga institusi atau kelompok-kelompok. Selain itu, sumberdaya juga bisa meliputi akses kepada media, dukungan simpatisan, loyalitas kelompok dan anggota, kesediaan ruang pertemuan atau ruang kantor, hak-hak, pengetahuan dan kemampuan dari aktor.

#### **1.6.1.3 Pembingkai atau Framing**

Teori Pemingkaian (*Framing Theory*) yang digunakan dalam studi gerakan sosial berasal dari pemikiran Goffman (dalam Sukmana, 2016: 201). Goffman mengartikan proses pembingkai merupakan proses yang digunakan oleh masyarakat untuk mereproduksi makna. Selanjutnya di dalam ilmu sosiologi, konsep pembingkai khususnya digunakan dalam studi gerakan sosial dan tindakan kolektif, seperti pernyataan Benford dan Snow (Sukmana, 2016: 202) bahwa aktor gerakan sosial dipandang sebagai agen signifikan yang secara aktif terlibat dalam produksi dan pemeliharaan makna untuk konsituen gerakan, pihak lawan, dan pengamat. Para aktor gerakan sosial secara mendalam terlibat dengan media, pemerintah lokal, dan negara, dengan apa yang disebut “politik signifikan”.

Mengacu kepada pandangan Benford dan Snow (Sukmana, 2016: 203) yang menyatakan bahwa *framing* membantu untuk membuat suatu peristiwa atau



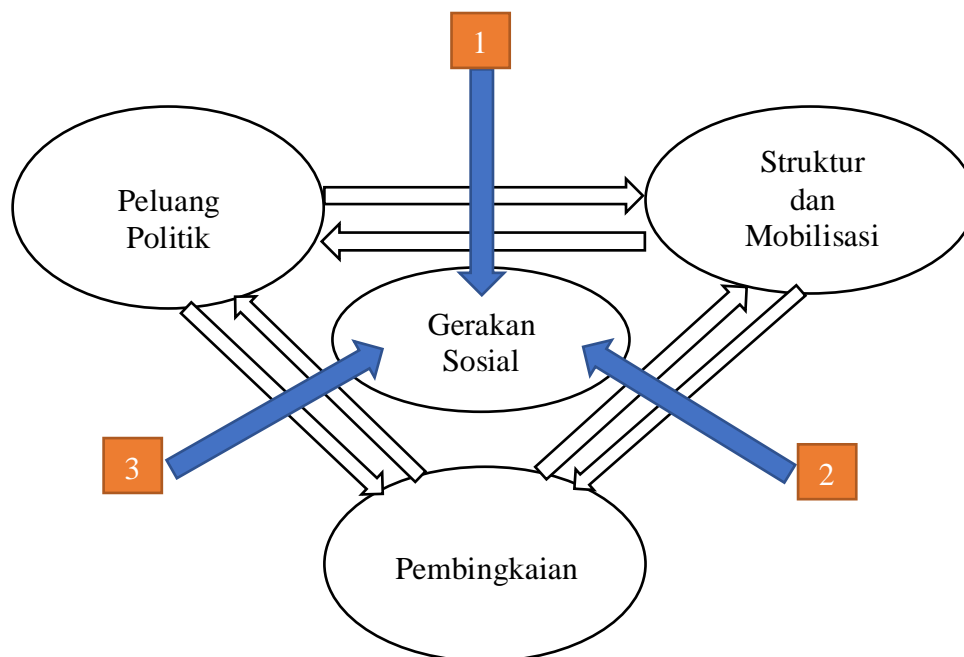
kejadian memiliki makna (arti) dan dengan demikian berfungsi untuk mengatur pengalaman dan membimbing tindakan. *Framing* tindakan kolektif juga melakukan fungsi penafsiran dan pemahaman yang dimaksud untuk mobilisasi pengikut potensial dan konsituen, untuk menggalang dukungan penonton dan mobilisasi antagonis. Dengan demikian, *framing* tindakan kolektif merupakan seperangkat aksi yang berorientasi memberikan keyakinan dan makna yang menginspirasi dan melegitimasi kegiatan, maupun kampanye dari organisasi gerakan sosial.

Proses pembingkai kultural gerakan sosial berkaitan dengan konstruksi identitas partisipan gerakan. Menurut Sigh (Sukmana, 2016: 203), teori ini berorientasi pada Identitas secara umum mempunyai sifat-sifat non material dan ekspresif. Teori Identitas membahas pertanyaan-pertanyaan tentang integrasi dan solidaritas dari kelompok yang terlibat aksi. Sementara Teori Pembingkai berfungsi menjawab dan membingkai gerakan sosial beserta produksi-produksi makna dalam gerakan tersebut.

Menurut Snow dikutip Klandermans dan Suzanne (2002), *frame* merupakan *interpretative schemata* yang membuat partisipan dalam menempatkan, menerima dan melabeli suatu hal. Oleh karena itu Klandermans dan Suzanne (2002) berpendapat bahwa *frame* memiliki elemen-elemen yang terdiri dari: (a) *Frame* memiliki konten; (b) *Frame* merupakan struktur kognitif atau skema; (c) *Frame* terdapat pada diri individu maupun lingkungan sosialnya. *Frame* merupakan skema kognitif seorang individu, skema ini berguna dalam membangun aksi kolektif apabila individu tersebut berbagi skema yang dimiliki kepada individu lain yang memiliki skema yang sama dalam suatu aksi yang

memiliki suatu pola; (d) *Frame* merupakan struktur kognitif seseorang dan hasil pengembangan proses kognitif. Berdasarkan hal ini, penelitian mengenai *framing* dapat dibagi menjadi dua tipe, yaitu: (1) memandang framing sebagai suatu kegiatan penting dalam mengembang pergerakan dengan menyebarkannya melalui *frame alignment processes*; dan (2) memandang *frame* sebagai konten dan struktur, yang mengungkapkan intepertasi partisipan ataupun pemimpinnya mengenai suatu hal dalam suatu waktu; dan (e) *Frame* didasarkan pada teks, *frame* dalam konteks ini dapat ditemukan dalam dokumen tertulis, komunikasi verbal yang terdiri dari percakapan, pidato, slogan, lagu, representasi secara visual yang terdiri dari gambar, ilustrasi kartun dan gabungan dari ketiganya. Sehingga *frame* biasanya dapat ditemukan melalui wawancara partisipan, analisa dokumen, pidato, slogan, dan lagu.

**Bagan 1.1 Model Kerangka Berpikir**



*Sumber: McAdam, McCarthy, dan Zal, (2004)*

Sebagaimana yang di gambarkan oleh model kerangka berpikir diatas, terdapat beberapa asumsi-asumsi yang dapat dijelaskan mengenai konteks gerakan sosial sebagai berikut:

1. Faktor peluang politik (*political opportunity*), struktur mobilisasi (*mobilizing structure*), dan pembedaan kultural (*cultural framing*), memiliki peranan yang sama dalam kemunculan dan perkembangan dari Gerakan Sosial.
2. Faktor pada peluang politik berkontribusi bagi muncul dan berkembangnya gerakan sosial jika di dukung faktor stuktur mobilisasi serta pembedaan.
3. Pada faktor struktur mobilisasi akan berkontribusi bagi muncul dan berkembangnya gerakan sosial jika di dukung faktor peluang politik serta pembedaan.
4. Faktor pembedaan kultural berkontribusi bagi muncul serta berkembangnya gerakan sosial jika ditopang oleh faktor stuktur mobilisasi dan peluang politik.
5. Analisis kemunculan dan perkembangan gerakan sosial dapat dikaji pada dimensi kombinasi antara faktor peluang politik dengan struktur mobilisasi (Angka 1).
6. Analisis kemunculan serta perkembangan gerakan sosial bisa dikaji dalam dimensi kombinasi antara faktor struktur mobilisasi dengan pembedaan (Angka 2).
7. Analisis kemunculan serta perkembangan gerakan sosial bisa dikaji pada dimensi kombinasi antara faktor pembedaan dan peluang politik (Angka 3).

### 1.6.2 Ekofeminisme

Ekofeminisme memiliki arah yang berkonsep dengan perdamaian antara sesama penghuni bumi guna menyelamatkan bumi serta perempuan dari kerusakan yang terjadi. Pada kebutuhan dalam berbagi antar makhluk hidup di masa saat ini ditekankan oleh ekofeminisme sebagai hal yang mutlak serta dalam berbagi, kita perlu mengendalikan diri guna memberikan kesempatan bagi yang lain pula (Astuti, 2012:51). Ekofeminisme sangat menekankan pada perlunya mengakhiri pertarungan kekuatan serta mulai untuk berbagi dalam membangun solidaritas sesama penghuni. Dengan hal itu tubuh dari perempuan yang sudah di rusak oleh kekuasaan membutuhkan aksi penyelamatan yang nyata dengan basis kepedulian. Jika hal itu dikaitkan dengan bumi, sikap tersebut serupa terhadap bumi yang juga memerlukan kepedulian atas dari lingkaran jahat kekuasaan serta bertujuan untuk terhindar dari bencana ekologi. Jika perempuan paham bahwa tubuhnya merupakan hak miliknya (empunya), mereka akan bersama sama dengan para penghuni bumi lain untuk menjaga tubuh perempuannya bukan sekedar sebagai property yang diatur oleh objek kuasa, namun sebagai sumber kehidupan bagi generasi yang akan datang. Sehingga ketika manusia atau penghuni bumi memiliki kesadaran bahwa bumi merupakan hak dari setiap individunya, maka seharusnya para penghuni akan menjaga bumi dan lingkungannya guna menjamin kehidupan yang akan datang serta bagi generasi-generasi selanjutnya.

Shiva dan Mies (1993) dalam bukunya *Ecofeminism* mengemukakan pemikiran dan gerakan ekofeminisme yang merupakan kritik terhadap pendekatan pembangunan yang tidak memperhatikan keberlangsungan ekologis sekaligus meminggirkan salah satu entitas manusia di dalamnya yaitu perempuan. Ekofeminisme mengupayakan memecahkan masalah kehidupan manusia dan alam yang berangkat dari pengalaman

perempuan dan menjadikan pengalaman perempuan sebagai salah satu sumber pembelajaran dalam pengelolaan dan pelestarian alam. Hal ini juga berarti memberikan ruang (akses) yang sama (adil dan setara) bagi perempuan bersama-sama laki-laki dalam pengelolaan dan pelestarian alam. Maka, seorang ekofeminisme adalah orang yang mempunyai cara pandang feminisme dan berperan serta untuk menciptakan dunia baru yang feminis dan ekologis.

### **1.6.2.1 Akar Gerakan**

Pada dasarnya, ekofeminisme merupakan istilah yang baru dimana ekofeminisme populer pada sekitaran akhir 1970-1980-an. Hal itu muncul sebagai bentuk protes serta bentuk penentangan terhadap perusakan ekologi atau lingkungan hidup yang akhirnya menimbulkan bencana ekologis. Ekofeminisme sebenarnya bentuk spiritual dari Materialisme Marxist serta Kapitalisme Patriarkhis. Pada spiritualitas ekofeminisme, memiliki tendensi terhadap ekologis yang sudah di maskulinitaskan demi kepentingan industri dimana seharusnya di kembalikan kepada kesucian kehidupan berbasis ibu bumi.

Ekofeminisme ialah gerakan yang hadir pada kalangan perempuan di seluruh dunia serta berasal dari berbagai profesi sbagai efek dari adanya sebuah ketidakadilan kepada perempuan yang dikaitkan selalu pada mitos dengan alam. Penjelasan mengenai lingkungan memiliki keterkaitan dengan ekofeminisme sebagai implikasi bentuk kesadaran feminis yang begitu tinggi pada kalangan ilmuan perempuan di berbagai perguruan tinggi dunia. Kesadaran perempuan feminis pada eksploitasi terhadap alam mengarahkan mereka untuk bangkit serta berperan dalam menyelamatkan lingkungan hingga nantinya tercipta kehidupan eco-friendly serta womanfriendly. Sehingga, poin terpenting pada hal itu ialah

Empati dan terlibat pada perempuan mengenai perannya di lingkungan hidup (Astuti, 2012:49).

Francois d'Eaubonne memperkenalkan terhadap "Revolusi Ekologis" yang berpendapat bahwa, perempuan memiliki kepastian dalam mengemban misi predamaian dunia. Hal itu dikarenakan perempuan memiliki dasar fundamental atau potensi dalam melakukan revolusi ekologis tersebut akibat kedekatannya dengan konsep ibu bumi. Karen J. Warren (1996) menjelaskan lebih rinci terhadap pandangan ekofeminisme yaitu (1) Terdapat keterkaitan yang sangat penting antara operasi terhadap alam dengan operasi terhadap perempuan. (2) Pemahaman terhadap alam serta keterhubungan tersebut ialah penting guna mendapatkan pemahaman yang memadai atas operasi terhadap alam dengan operasi terhadap perempuan, (3) Praktik dan teori feminis haruslah memasukkan perspektif ekologi serta (4) Pemecahan masalah ekologi mengharuskan menyertakan perspektif feminis.

Ekofeminisme mempunyai value yang lebih dikarenakan tidak hanya focus pada diri pada subordinasi perempuan, namun lebih dari itu yaitu juga subordinasi alam-lingkungan (ekosistem) yang berada di bawahh kepentingan dari manusia. Oleh karena itu, ekofeminisme mengkritisi pilar-pilar modernisme yang menempatkan posisi serta kepentingan manusia lebih dari kepentingan dari makhluk lain (antroposentrisme) serta paham yang menempatkan kepentingan laki-laki serta posisinya lebih diatas dibanding posisi serta kepentingan perempuan (androsentrisme). Hingga pada akhirnya, ekofeminisme menemukan titik jangkauan bersama (*common denominator*) yang pas dalam menggambarkan bahwa energy feminitas sangatlah berpotensi menjaga kelestarian lingkungan

hidup (laki-laki dan perempuan). Ekofeminisme sangat baik serta mampu menjelaskan betapa hipermaskulinisme yang nyatanya berperan juga terhadap kerusakan akan ekofeminisme.

#### **1.6.2.2 Perkembangan Pemikiran Ekofeminisme**

Meskipun pada ekofeminisme menyetujui mengenai hubungan perempuan dengan alam sebagai penyebab utama dari seksisme dan naturisme, namun mereka tidak menyepakati pada hal apakah hubungan alam dengan perempuan, bersifat sosial serta kultural. Ekofeminisme juga tidak menyepakati terhadap hal apakah perempuan harus menekankan, menghilangkan, ataupun membentuk ulang hubungan dengan alam. Hingga pada titik itulah muncul beragam aliran ekofeminisme. Dirangkum dari buku *Feminist Thought: pengantar paling komprehensif kepada aliran utama pemikiran feminis* karya Rosemarie Putnam Tong terdapat 4 aliran ekofeminisme, yaitu:

##### **a. Ekofeminisme Alam (kultural)**

Perempuan adalah bagian dari alam, hal itu merupakan anggapan yang berasal dari ekofeminisme kultural. Sehingga, seringkali pada pandangan ekofeminisme kultural, manusia disebut sebagai makhluk ekologi yang unik. Ekofeminisme kultural mememilikipandangan bahwa sifat peduli seperti halnya merawat, mengasuh serta lainnya yang di hubungkan dengan perempuan merupakan anggapan yang merendahkan perempuan jika dilihat secara tradisional. Selain itu, Ekofeminisme alam menolak inferioritas yang diasumsikan kepada perempuan dan alam dan superioritas yang diasumsikan kepada laki-laki dan kebudayaan. Sebaliknya, pada ekofeminisme alam menegaskan bahwa alam serta perempuan tidak setara dan mungkin lebih baik dibanding laki-laki dan

kebudayaan, serta mengimplikasikan bahwa nilai-nilai tradisional perempuan bisa mendorong hubungan sosial yang lebih baik dan mengedepankan cara hidup berkelanjutan.

#### **b. Ekofeminisme Spiritual**

Ekofeminisme Spiritual meyakini bahwa kebudayaan yang memandang tubuh perempuan dan alam sebagai yang sakral, dengan menggunakan analogi peran perempuan secara biologis seperti “ibu pertiwi” dan peran secara arketipikal (dasar) “ibu kelahiran”, maka peran perempuan dan alam akan lebih diuntungkan dari pada hubungan laki-laki dengan alam. Ekofeminis spiritual cenderung memfokuskan untuk penyembahan dewi-dewi kuno dan ritual penduduk asli Amerika yang berorientasi pada bumi. Ekofeminis spiritual menggunakan “teknik pembangunan komunitas” sebagai pertunjukan seni, observasi kinetis (menari dan menyanyi), dan ritual yang memungkinkan manusia “untuk menciptakan dan memelihara komunitas satu sama lain dalam situasi yang sulit dan saling berkompetisi dalam keterlibatan politis di dunia publik.

#### **c. Ekofeminisme Sosial-Konstruksionis**

Ekofeminisme Sosial-Konstruksionis menolak anggapan bahwa perempuan secara “alamiah” memiliki sifat peduli dan pengasuh, tapi sebaliknya karakteristik perempuan merupakan produk enkulturalisasi dan sosialisasi. Ekofeminisme sosial menjelaskan implikasinya jika perempuan meminimalkan hubungan mereka dengan alam yang dikonstruksikan secara sosial dan dipaksakan secara ideologis, maka perempuan akan terus menerus tersubordinasi oleh laki-laki, begitu juga alam akan tersubordinasi oleh kebudayaan.

#### **d. Ekofeminisme Sosial-Transformatif**



Salah satu aliran ekofeminisme yaitu “Ekofeminis Transformatif” memberikan beberapa hal penjelasan terhadap hubungan mengenai perempuan dengan alam. Penjelasan tersebut membentuk dasar fundamental sebagai ciri daripada ekofemini transformatif dengan ekofeminis lainnya. Yaitu, 1) Mengakui serta mengeksplisitkan saling keterkaitan antara semua system operasi, 2) Menekankan keberagaman pengalaman perempuan serta menghindari pencarian perempuan dan pengalamannya, 3) Menolak logika dominasi, 4) Memikirkan ulang apa artinya menjadi manusia, serta dengan penuh keberanian mempertimbangkan kembali apakah manusia harus memandang “kesadaran” tidak hanya sebagai pembeda manusia dari bukan-manusia tetapi lebih baik daripada bukan-manusia, 5) Bergantung pada etika yang menekankan nilai feminine tradisional yang tendensinya untuk menjalin, saling menghubungkan, serta menyatukan manusia, 6) Meyakini bahwa ilmu pengetahuan serta teknologi hadir di digunakan untuk menjaga kelangsungan bumi (Tyas, 2007).

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Desain Penelitian**

Metode yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif dapat lebih komprehensif untuk menyimpulkan suatu peristiwa ataupun menganalisa fenomena. Disini peneliti akan menggunakan pengumpulan data atau informasi melalui wawancara secara mendalam serta informasi-informasi lainnya baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif sebagai metode penelitiannya.

Menurut (Sugiyono, 2011) metode kualitatif merupakan metode yang digunakan sebagai meneliti terhadap bagaimana kondisi alamiah. Pada penelitian ini pula, memiliki sifat deskriptif-kualitatif yang berusaha mencoba menjelaskan bagaimana situasi serta kondisi hingga berbagai realitas sosial yang terjadi pada obyek penelitian. Sehingga peneliti berusaha menarik realitas sebagai bentuk ciri ataupun karakter yang ada mengenai fenomena tertentu.

### **1.7.2 Situs dan Subjek Penelitian**

Pada penelitian ini, penelitian akan dilaksanakan di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah tepatnya pada daerah yang menjadi penambangan batuan andesit. Adapun subyek pada penelitian ini merupakan informan yang dapat memberikan informasi ataupun penjelasan terkait topik yang akan di teliti adalah masyarakat setempat ataupun masyarakat yang tergabung dalam forum GEMPA DEWA (Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas) termasuk Wadon Wadas.

### **1.7.3 Jenis dan Sumber Penelitian**

#### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang didapatkan dari bagaimana yang ada di lapangan. Data primer didapatkan melalui pengamatan obyek penelitian ataupun berasal dari wawancara. Data primer merupakan salah satu pokok yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan berkas-berkas ataupun data yang ada atau berkaitan dengan penelitian. Data sekunder dapat berupa laporan, catatan, ataupun data lainnya yang akan diolah nantinya oleh peneliti. Data sekunder

juga dapat sebagai data pelengkap yang berasal dari referensi buku, jurnal, skripsi, thesis, dan sebagainya.

#### **1.7.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara mendapatkan data dan mengolah data yang telah didapatkan. Peneliti disini menggunakan teknik triangulasi atau banyak sumber data.

##### **a. Observasi**

Observasi atau pengamatan Pengamatan yang dilakukan oleh seseorang mengenai hal yang sudah terencana ataupun yang belum terencana serta sepiantas atau dengan jangka waktu yang cukup lama. Sehingga pada observasi biasanya memiliki makna sebagai salah satu cara guna mengumpulkan data-data melalui proses pengindraan yang terjadi sesuai realita atau fakta di lapangan. Gulo (2002) menyebutkan bahwa observasi merupakan teknik dengan melihat secara langsung mengenai keadaan yang terjadi.

##### **b. Wawancara**

Wawancara adalah tindakan pengumpulan informasi yang didapatkan dari ungkapan informan, sehingga dalam wawancara dilakukan untuk mencari fakta tertentu. Dalam proses wawancara, memiliki salah satu ciri yang ada yaitu dengan adanya interaksi antara pemberi informasi dengan pencari informasi. Sehingga dalam wawancara terdapat proses tanya jawab sebagai rangkaian untuk mencari suatu informasi guna mencari data untuk menunjang penelitian.

Peneliti akan mewawancarai beberapa pihak yang terlibat dalam permasalahan yang diteliti oleh peneliti seperti perempuan Desa Wadas (Wadon Wadas), masyarakat yang tergabung dalam GEMPA DEWA, serta beberapa organisasi masyarakat sebagai pihak pro terhadap perjuangan perempuan.

c. Dokumen

Dokumen merupakan salah satu cara yang digunakan guna mengumpulkan data-data yang sifatnya tertulis. Hal itu digunakan untuk di pelajari serta di kumpulkan. Dalam dokumen, data-data dapat berasal dari beberapa arsip, laporan ataupun teks yang memiliki keterkaitan dengan obyek penelitian.

### **1.7.5 Teknik Analisis Data**

Setelah peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan dalam membantu penelitian, maka tahap selanjutnya ialah melakukan pengolahan data. Dalam pengolahan data tersebut, peneliti menggunakan teknik:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan langkah yang bertujuan untuk memilih serta memilah hal-hal yang diperlukan untuk diteliti. Setelah itu, mencari pola yang dibutuhkan. Tahap tersebut, peneliti akan melakukan seleksi informasi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian serta informasi mana yang tidak memiliki keterkaitan dengan penelitian. Pada data yang dikurangi, akan memiliki bentuk seperti kerucut. Hal itu kurang dan mengarah pada poin permasalahan sehingga dapat memberikan objek penelitian yang lebih jelas.

b. Penyajian Data

Berasal dari data yang sudah didapatkan disajikan melalui mendeskripsikannya dengan bentuk teks. Data yang ditampilkan atau yang disajikan oleh peneliti dengan sebaik mungkin sesuai dengan fakta yang sebenar-benarnya. Hal itu memiliki tujuan supaya bias menyajikan data-data yang sudah di reduksi dengan benar serta dengan keadaan yang sesuai yang ada di lapangan.

c. Pengambilan Keputusan dan Verifikasi

Pada tahap pengambilan keputusan, proses yang dilakukan ialah dengan memasukkan ulang data yang sudah disajikan. Pada pengambilan keputusan pada tahap akhir akhir yaitu dengan menarik kesimpulan setelah setelah semua permasalahan yang menjadi objek penelitian bias dipahami serta ditemukan jawabannya.